

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya krisis moneter yang menjadi pemicu dalam masa transisi politik telah terjadi perubahan fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. Dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia ke arah yang nyata yaitu memberikan hikmah yang sangat besar kepada daerah-daerah untuk menikmati otonomi daerah atau kebebasannya mengelola rumah tangganya dan untuk mensejahterakan dirinya. Bukan hak kepala daerah yang dengan semena-mena mengelola rumah tangganya untuk kepentingan dirinya sendiri perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah di seluruh Indonesia. Menurut Kamus Besar dan Glosarium otonom daerah, bahwa Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Arti "luas dalam otonomi daerah yaitu keleluasan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah yang mencakup semua bidang pemerintah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal agama. Begitu juga dengan arti "nyata dalam otonomi daerah yaitu, keleluasan daerah untuk penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah. sedangkan arti "tanggung jawab dalam otonomi daerah yaitu, berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan dalam pencapaian tujuan. Daerah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam hal ini yang menjadi tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi yang dimaksud dengan inovasi yaitu dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Selain itu, dengan adanya otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif mengatur daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah dengan melakukan identifikasi sumber-sumber penerimaan, dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.

Namun pada kenyataannya masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki potensi alam yang berbeda pada kenyataannya ada daerah yang memiliki potensi cukup baik, ada juga daerah yang memiliki potensinya masih rendah. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan tersebut maka pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana perimbangan ini terdiri dari Bagian Daerah, yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan di Indonesia itu berlaku sejak tahun 1999 nampaknya dengan dana perimbangan ini daerah-daerah itu menjadi terlena mereka tidak kreatif untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaannya sehingga daerah itu cenderung menjadi tergantung kepada

pemerintah pusat dan ini gambarannya bukan hanya di seluruh Indonesia khusus untuk provinsi Gorontalo akan saya teliti.

Besaran dana perimbangan berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada potensi sumber-sumber dan kekayaan alam ataupun jumlah penduduk yang terdapat di daerah tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah juga tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki daerah. Sumber Daya Manusia berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di samping hal-hal yang menyangkut prasarana, sarana, dan wahana yang diperlukan. Terpusatnya SDM berkualitas di Kota-kota besar dapat didistribusikan ke daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menciptakan kelembagaan pemerintah daerah otonom yang mampu, perlulah diisi oleh SDM yang berkualitas.

Pada dasarnya, implikasi dari otonomi daerah ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh setiap daerah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Peran pemerintah sebagai penggerak pembangunan sangat penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk

menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan, perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, yaitu dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Perhitungan PDRB termasuk Provinsi di Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata mencapai 7.39% hal ini disebabkan karena di lihat dari beberapa sektor antara lain pertanian.

PDRB atas dasar Harga Konstan di Provinsi Gorontalo menunjukkan jumlah akhir yang diproduksi seluruh sektor perekonomian di Provinsi Gorontalo yang menggunakan harga pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan data PDRB atas dasar Harga Konstan 2010. PDRB atas dasar Harga Konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing daerah tingkat dua baik kabupaten maupun kota di Provinsi Gorontalo selama periode 2010-2015 dapat dilihat dari table 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 dan
Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten dan Kota
Tahun 2010-2015

Tahun	Daerah	PDRB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Daerah	PDRB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	Kab. Boalemo	1 930 376.61	7.24	Kab. Gorontalo Utara	1 250 044.99	7.66
2011		2 185 023.55	6.74		1 337 545.26	7.00
2012		2 213 391.10	7.42		1 432 876.71	7.13
2013		2 378 894.45	7.48		1 535 436.81	7.16
2014		2 552 605.53	7.30		1 645 174.53	7.15
2015		2 552 605.53	6.37		1 765 264.77	7.30
2010	Kab. Gorontalo	4 820 741.61	7.62	Kab. Bone Bolango	1 719 662.55	6.66
2011		5 193 085.66	7.72		1 838 623.27	6.92
2012		5 594 792.60	7.74		1 975 880.41	7.47
2013		6 027 132.43	7.73		2 126 544.91	7.63
2014		6 495 322.01	7.77		2 290 609.53	7.72
2015		6 903 785.63	6.29		2 439 871.22	6.52
2010	Kota Gorontalo	4 820 741.61	7.60	Kab. Pohuwato	2 535 302.83	7.45
2011		5 193 085.66	7.79		2 715 449.12	7.11
2012		5 594 792.60	7.88		2 919 368.90	7.51
2013		6 027 132.43	7.90		3 143 289.45	7.67
2014		6 495 322.01	7.93		3 371 685.98	7.27
2015		6 903 785.63	7.23		3 576 029.01	6.06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi

Dari Hasil Tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di setiap Daerah Tingkat Dua di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tingkat dua didorong oleh meningkatnya PDRB terutama darisektor pertanian.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK dan DBH
Setiap Kabupaten dan Kota
Tahun 2010-2015

Kabupaten/Kota	Tahun	PE	DAU	DAK	DBH
Kab. Boalemo	2010	1 930 376.61	218,555	35,306	16,359
	2011	2 185 023.55	253,481	46,055	18,841
	2012	2 213 391.10	299,141	36,230	21,015
	2013	2 378 894.45	341,152	66,340	20,645
	2014	2 552 605.53	389,549	72,407	15,000
	2015	2 552 605.53	405,984	83,524	15,206
Kab. Gorontalo	2010	4 820 741.61	338,845	59,382	17,920
	2011	5 193 085.66	408,454	60,872	14,000
	2012	5 594 792.60	462,746	57,519	14,589
	2013	6 027 132.43	517,230	60,972	15,668
	2014	6 495 322.01	601,207	63,956	11,367
	2015	6 903 785.63	625,487	78,380	9,009
Kab. Bone Bolango	2010	1 719 662.55	240,131	34,415	54,425
	2011	1 838 623.27	267,850	27,062	16,822
	2012	1 975 880.41	318,414	33,891	23,152
	2013	2 126 544.91	367,000	43,009	26,570
	2014	2 290 609.53	408,501	52,754	20,617
	2015	2 439 871.22	426,858	62,417	20,617
Kab. Gorontalo Utara	2010	1 250 044.99	185,019	38,104	14,264
	2011	1 337 545.26	210,602	43,271	18,451
	2012	1 432 876.71	251,596	41,547	22,285
	2013	1 535 436.81	288,205	64,699	22,285
	2014	1 645 174.53	324,122	67,845	14,250
	2015	1 765 264.77	341,978	75,827	14,904
Kab. Kota Gorontalo	2010	4 820 741.61	264,393	27,269	22,920
	2011	5 193 085.66	296,633	28,679	12,478
	2012	5 594 792.60	366,464	34,950	13,725
	2013	6 027 132.43	419,155	37,485	17,099
	2014	6 495 322.01	456,331	39,692	17,099
	2015	6 903 785.63	474,500	40,528	17,975
Kab. Pohuwato	2010	2 535 302.83	255,982	33,264	22,405
	2011	2 715 449.12	296,367	44,304	20,758
	2012	2 919 368.90	342,707	41,066	23,063
	2013	3 143 289.45	390,973	69,787	30,731
	2014	3 371 685.98	438,955	71,843	19,622
	2015	3 576 029.01	456,664	81,771	19,749

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Dari Hasil Tabel 1.2 di atas dapat di lihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di setiap Daerah Tingkat Dua di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami perubahan dari tahun ketahun.

Percepatan pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor di setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo juga tidak dapat di pisahkan dari unsur keuangan antara kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo karena setiap daerah memerlukan keuangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, didukung dengan pembagian keuangan antara pusat dan daerah merupakan persayaratan dalam sistem pemerintahan dan administrasi Negara. Keadaan finansial kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masih kurang mandiri karena masih bergantung pada transfer pusat antara Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.atau dengan kata lain APBD masih bergantung sepenuhnya pada dana dari pusat.

Sehingganya dari uraian latar belakang di atas, penulis menelusuri dan memecahkan masalah tersebut melalui penelitian dengan judul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya ketergantungan daerah tiap Kabupaten/Kota atas dana perimbangan dalam membiayai pembangunan.
2. Masih kurang berkembangnya sumber pendapatan asli daerah tiap Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Seberapa Besar Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan

Adapun yang menjadi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara umum diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan

yakni dapat melengkapi kajian Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi, serta sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, tentang gambaran penggunaan dana perimbangan serta pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo.